IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) DI SMP NEGERI 7 KOTA JAMBI

Muhammad Taufiqurrahman¹, H. Eja Armaz Hardi², Solichah³
taufikaja677@gmail.com¹, eja.armaz.hardi@uinjambi.ac.id², solichah@uinjambi.ac.id³
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

ABSTRAK

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) di SMP Negeri 7 kota jambi telah mengalami perubahan metode pengelolaan yang awalnya konvensional menjadi Syariah, sehingga prinsip yang diterapkan haruslah prinsip-prinsip Ekonomi Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) di SMP Negeri 7 Kota Jambi. Apa saja kendala dalam penerapannya, serta upaya untuk mengatasi permasalahan dalam implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) tersebut. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 7 Kota Jambi dengan subjek penelitian yaitu pengurus koperasi (Ketua, Sekretaris, Bendahara) dan Anggota Koperasi. Pada implementasinya Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) di SMP Negeri 7 Kota Jambi, telah dilaksanakan berdasarkan lima nilai universal pada prinsip-prinsip ekonomi syariah yang terdiri dari: Tauhid, keadilan, Nubuwwah, Khilafah, dan Ma'ad. Meskipun dalam implementasinya masih terdapat kendala pada penerapan prinsip tauhid, nubuwwah dan khilafah, akan tetapi dapat diatasi dengan pendekatan persuasif dan transparan dalam pengelolaan dana koperasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) di SMP Negeri 7 Kota Jambi dapat berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Implementasi, Prinsip Ekonomi Syariah, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS).

ABSTRACT

The Sharia Financing Savings and Loans Cooperative (KSPPS) at SMP Negeri 7, Jambi City has undergone a change in management methods from conventional to Sharia so that the principles applied must be the principles of Sharia Economics. This study aims to determine how the implementation of sharia economic principles is in the Sharia Financing Savings and Loans Cooperative (KSPPS) at SMP Negeri 7, Jambi City. What are the obstacles in its implementation, and efforts to overcome problems in the implementation of sharia economic principles in the Sharia Financing Savings and Loans Cooperative (KSPPS). The research approach used in this study is descriptive qualitative. The data collection technique is carried out by observation and interviews. This research was conducted at SMP Negeri 7, Jambi City with the research subjects being the cooperative administrators (Chairman, Secretary, Treasurer) and Cooperative Members. In its implementation, the Sharia Financing Savings and Loans Cooperative (KSPPS) at SMP Negeri 7 Jambi City, has been implemented based on five universal values in the principles of sharia economics consisting of: Tauhid, justice, Nubuwwah, Khilafah, and Ma'ad. Although in its implementation there are still obstacles in the application of the principles of tauhid, nubuwwah and khilafah, they can be overcome with a persuasive and transparent approach in managing cooperative funds. So it can be concluded that the Implementation of Sharia Economic Principles in the Sharia Financing Savings and Loans Cooperative (KSPPS) at SMP Negeri 7 Jambi City can run well.

Keywords: Implementation, Sharia Economic Principles, Sharia Financing Savings And Loans Cooperative (KSPPS).

PENDAHULUAN

Koperasi merupakan suatu usaha atau bisnis terdiri kelompok, organisasi, atau perkumpulan yang dikelola guna mencapai tujuan bersama. Koperasi biasanya mengandung landasan prinsip kekeluargaan. Hadirnya koperasi mampu mengubah taraf ekonomi dan membantu anggota dalam hal materi dan sosial. Koperasi merupakan suatu badan hukum usaha atau bisnis yang didirikan oleh kelompok yang aktif. Menurut Paul Hubert Casselman berpendapat bahwasanya koperasi yaitu suatu sistem yang berdasarkan sistem ekonomi yang mana mengandung unsur yang berbaur sosial. Unsur sosial, yaitu unsur yang bermakna kerja sama.

Manusia tidak bisa atau tidak dapat hidup sendiri, manusia merupakan suatu makhluk sosial yang mana membutuhkan manusia yang lain untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh beberapa manusia dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, Nuraini menyatakan pendapatnya bahwasanya koperasi merupakan suatu kumpulan dari produsen-produsen kecil yang bergabung secara bersama guna mencapai tujuan bersama. Produsen produsen kecil tersebut melakukan kerjasama serta menanggung resiko bersama terhadap usaha yang dikelola.

Koperasi memiliki dampak atau peran dalam proses pembangunan sosial ekonomi. Dampak dari koperasi tersebut dapat berupa dampak mikro langsung terhadap perekonomian anggotanya dan juga dampak mikro tidak langsung terhadap lingkungan organisasi koperasi melalui peningkatan lapangan kerja, peningkatan inovasi, pertumbuhan dan bagi hasil yang lebih baik dan lain sebagainya. Sedangkan dampak makro koperasi, antara lain, koperasi memberikan kontribusi potensial bagi pembangunan ekonomi, misalnya:

- a) Peningkatan pendapatan dan perbaikan keadaan ekonomi petani, pengrajin dan lain-lain, serta pengurangan kemiskinan pedesaan,
- b) Meningkatkan kegiatan pembentukan modal dan peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, terhadap anggota, karyawan dan manajer, dan
- c) Pengembangan pasar, perbaikan struktur pasar dan persaingan yang lebih efektif.

Rata-rata masyarakat memiliki suatu usaha atau bisnis. Usaha atau bisnis tersebut dapat berkembang dan berjalan lancar dengan adanya modal. Pelaku bisnis atau usaha baik itu dalam skala usaha kecil maupun menengah dapat menjalankan suatu bisnisnya sangat dibutuhkan modal. Salah satu lembaga keuangan yang dapat membantu adalah koperasi, di samping BUMN, BUMD dan termasuk dalam sektor usaha formal. Koperasi merupakan suku guru perekonomian rakyat. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1, yaitu:

”Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Koperasi merupakan suatu bentuk kerjasama dalam lapangan perekonomian. Kerjasama ini diadakan karena kesamaan jenis kebutuhan hidup. Untuk mengusahakan kebutuhan hidup sehari-hari yang berhubungan dengan perusahaan ataupun rumah tangga. Dengan adanya kerjasama yang berlangsung terus-menerus, maka dibentuklah suatu perkumpulan sebagai bentuk kerja sama.

Pembangunan ekonomi Indonesia mengikuti prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam UUD 1945. Dengan mengacu pada konstitusi masyarakat, budaya, adat istiadat, spiritualitas dan model ekonomi, prioritas diberikan kepada persatuan, masyarakat dan kekerabatan. Sistem ekonomi yang paling berlaku di Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila. Pelaku ekonomi utama dalam Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) meliputi 3 (tiga), BUMN/BUMD, swasta, dan koperasi. SEP memiliki prinsip, di mana koperasi merupakan tumpuan perekonomian, sistem ekonomi yang tidak didominasi oleh modal, tetapi berdasarkan asas

kekeluargaan.

Sementara itu, Mubyarto meyakini bahwa ada bagian dari SEP yang disebut Ekonomi Rakyat. yang di mana guru adalah tumpuan koperasi. Kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih bisa dikatakan belum memberikan dampak yang cukup signifikan, yang menunjukkan bahwa koperasi Indonesia secara keseluruhan belum berperan sangat baik dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan anggotanya, serta masih belum dapat menjadi solusi bagi pemerataan yang adil.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2015, dan status Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia adalah 69,55. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia Indonesia masih berada pada tingkat sedang, dan tingkat kesejahteraannya masih relatif rendah.

Tujuan didirikannya koperasi tidak hanya berorientasi pada laba (profit oriented) saja, tetapi juga harus berorientasi manfaat (benefit oriented) seperti membantu memudahkan anggota (Masyarakat), menjadi sebuah solusi terutama dalam hal materi. Salah satu lembaga yang mampu menjadi solusi untuk para pelaku usaha yaitu koperasi syariah. Koperasi syariah mampu memberikan modal kepada pelaku usaha yang membutuhkan modal usaha. Diberikannya suatu modal dengan syarat jenis usaha nya tidak menantang ajaran Islam. Koperasi syariah mampu meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat yang menjalankan bisnis atau usahanya.

Jika usahanya memiliki modal yang cukup maka pelaku bisnis tersebut mampu mengembangkan usahanya. Koperasi syariah juga dapat meningkatkan roda perekonomian suatu Negara. Lembaga keuangan syariah dalam kemajuan perekonomian masyarakat mempunyai peran yang sangat penting bagi para pelaku usaha. Lembaga keuangan syariah mampu memberikan kebutuhan pembiayaan kepada para pelaku usaha guna mengembangkan usaha tersebut. Kehadiran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank dengan sistem ekonomi syariah sebagai organisasi yang dianggap relatif baru dapat menimbulkan tantangan besar.

Hadirnya koperasi syariah, memberikan banyak peluang bagi masyarakat dalam menjalankan bisnis atau usahanya. Oleh karena itu, pada penelitian yang dilakukan memberikan rasa ketertarikan dalam peneliti untuk menganalisis tentang implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah tersebut berjalan dengan baik atau tidak di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) di SMP Negeri 7 Kota Jambi. Pada masalah penelitian ini bagaimana implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah pada KSPPS SMP Negeri 7 Kota Jambi. Adapun tujuan dilakukannya penelitian guna memberikan ilmu pengetahuan serta wawasan kepada pembaca mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam tatanan pelaku usaha serta masyarakat di Indonesia.

Keuangan syariah yang berprinsip syariah dalam mengelola perekonomiannya. Koperasi syariah merupakan lembaga keuangan yang bertujuan sebagai perantara antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana yang aktivitasnya harus sesuai dengan prinsip- prinsip ekonomi syariah. Maraknya pertumbuhan dan perkembangan Lembaga Keuangan Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah NonBank masih dipandang sinis oleh beberapa kalangan, bahkan di kalangan umat Islam sendiri.

Sinisme tersebut terlihat dari rendahnya kepercayaan dan partisipasi umat Islam dalam berinvestasi. Ada pandangan yang menyatakan, walaupun namanya menggambarkan syariah, namun tetap saja penerapannya sama seperti sistem ekonomi konvensional. Pandangan tersebut sangat merugikan lembaga keuangan syariah. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan suatu usaha untuk memberi keinginan kepada

masyarakat, khususnya umat Islam yang menginginkan jasa layanan lembaga keuangan syariah yang berprinsip syariah dalam mengelola perekonomiannya. Koperasi syariah merupakan lembaga keuangan yang bertujuan sebagai perantara antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana yang aktivitasnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Lembaga Keuangan yang ada di kota Jambi terkhusus pada sekolah-sekolah yang mempunyai KSPPS masih belum sepenuhnya melaksanakan koperasi syariah ini, hal ini dapat dibuktikan ketika peneliti melakukan studi pendahuluan keberapa sekolah sehingga pada akhirnya peneliti tertarik meneliti di SMP Negeri 7 Kota Jambi.

Perubahan jenis koperasi ini diawali pada tahun 2014 dimana pertama kali koperasi dibentuk di SMP Negeri 7 Kota Jambi. Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan dari informan, bahwa dulu koperasi di sekolah ini hanya bersifat simpan pinjam saja. Jika ada anggota yang meminjam dengan keperluannya maka akan dikenakan bunga sesuai dengan kesepakatan yang ada. Selang 2 tahun koperasi di SMP Negeri 7 Kota Jambi ini kembali mengalami perubahan yang cukup mengejutkan. Dimana koperasi hanya diperuntukkan untuk mendanai UMKM saja. Jadi jika anggota ingin meminjam artinya anggota tersebut harus mempunyai surat izin usaha yang ditunjukkan sebagai syarat pengajuan peminjaman. Tentunya hal ini juga melibatkan persen riba yang cukup besar.

Hingga beberapa kali terjadi ketidaksesuaian data maupun ketidakadilan dalam meminjam dana koperasi ini, hingga di awal tahun 2019 berubah menjadi KPN yaitu (Koperasi Pegawai Negeri) yang tentunya hanya diperuntukkan untuk pegawai negeri saja. Dengan sistem simpan pinjam dengan bunga yang disepakati 5%. Dengan jumlah anggota guru dan staf honorer di SMP Negeri 7 Kota Jambi sekitar 30 orang. Maka pasca Covid-19 berlalu, akhirnya Koperasi ini berubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dengan harapan semua bisa menjadi anggota koperasi dan harapannya bisa merata serta dapat membantu meringankan jika ada kebutuhan mendesak.

KSPPS Pegawai SMP Negeri 7 Kota Jambi menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam semua produknya, seperti dalam pengelolaan kantin kejujuran, pengelolaan kantin, pengelolaan geleri ATM, kerjasama dengan bank syariah dan Unit Pembiayaan Syariah. Produk-produk ini dikelola dengan berbagai akad, seperti akad murabahah (jual beli), akad ijarah (upah), akad ijarah (sewa), akad musyarakah (kerjasama), dan lain-lain. KSPPS Pegawai SMP Negeri 7 Kota Jambi telah banyak memberikan manfaat bagi anggotanya. Seperti yang diterangkan oleh seorang anggota KSPPS di SMP Negeri 7 Kota Jambi.

KSPPS SMP Negeri 7 Kota Jambi cukup membantu terutama untuk kebutuhan mendesak. Bagi beliau, dalam pelayanan untuk peminjaman, KSPPS SMP Negeri 7 Kota Jambi melayani anggota dengan cepat, mudah, dan bagi hasilnya rendah. Begitupun dengan pinjaman dalam jumlah besar, selama memenuhi persyaratan yang berlaku. Untuk pembagian hasil atau SHU alhamdulillah meningkat. (Wawancara pribadi dengan Ibu N, anggota KSPPS di SMP Negeri 7 Kota Jambi, 05 Oktober 2023).

Hasil Survey awal wawancara peneliti dengan pengurus terkait penerapan prinsip-prinsip koperasi syariah pada KSPPS di SMP Negeri 7 Kota Jambi yaitu dengan Ibu N pada tanggal 05 Oktober 2023.

Pertanyaan : “Bagaimana penerapan prinsip pada Koperasi di SMP Negeri 7 Kota Jambi?

Jawaban : “prinsip awal yang dipakai pada koperasi di SMP Negeri 7 Kota Jambi adalah prinsip koperasi konvensional. Namun, dalam perjalanannya koperasi di sini berubah menjadi syariah yang dalam perjalanannya pun kami mengikuti prinsip dari koperasi syariah dimana sedang tahap proses.”

Pertanyaan : Apakah ada kendala dalam penerapan prinsip koperasi syariah?

Jawaban : Selama koperasi ini berjalan, seyogyanya pasti terdapat kendala dalam penerapan prinsipnya terutama menjelaskan mekanisme penerapannya kepada anggota yang belum cukup paham”.

Dalam melengkapi penelitian ini, peneliti menggunakan teori prinsip koperasi syariah dalam Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) yaitu: 1. Prinsip Tauhid (keimanan atau keesaan Allah), 2. Prinsip 'Adl (keadilan), 3. Prinsip Nubuwwah (kenabian), 4. Prinsip Khilafah (pemimpin), 5. Ma'ad (hasil)

Berikut peneliti lampirkan data gambaran KSPPS di SMP Negeri 7 Kota Jambi.

Tabel 1. Buku Jurnal Harian Kas Masuk

BULAN	DEBIT	KREDIT				
		Simpanan Pokok	Simpanan Wajib	Simpanan Sukarela	Pinjaman	Jasa Pinjaman
Januari	83.320.000	-	7.250.000	15.725.000	54.651.000	5.594.000
Februari	95.075.000	-	7.550.000	735.000	5.609.000	5.609.000
Maret	147.763.000	-	8.350.000	725.000	5.174.000	5.174.000
April	79.262.000	-	8.150.000	7.475.000	4.679.000	4.679.000
Mei	32.639.000	-	7.050.000	625.000	2.404.000	2.404.000
Juni	74.990.109	-	7.650.000	2.862.000	5.423.000	5.423.000
Juli	83.794.000	50.000	8.850.000	625.000	6.589.000	6.589.000
Agustus	115.354.000	-	8.400.000	625.000	5.999.000	5.999.000
September	155.848.000	-	7.500.000	5.575.000	4.939.000	4.939.000
Oktober	88.855.000	-	8.250.000	625.000	5.325.000	5.325.000
November	149.064.000	-	7.950.000	575.000	6.814.000	6.814.000
Desember	202.963.293	-	10.020.000	1.699.293	7.506.000	7.506.000
TOTAL	1.308.927.402	50.000	96.970.000	37.871.402	66.055.000	66.055.000

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KSPPS SMPN 7 Kota Jambi Tahun 2023

Pada tabel diatas yang didapat penulis jelaskan bahwa data ini dapat digunakan untuk melihat bagaimana pengorganisasian modal awal pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) di SMP Negeri 7 Kota Jambi yang nantinya dapat menjadi acuan dalam menganalisis apakah prinsip-prinsip ekonomi syariah telah dijalankan sepenuhnya atau tidak.

Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan baik kepada pengurus maupun anggota, terdapat beberapa kesenjangan yang peneliti simpulkan. Hal ini terkait beberapa anggota yang memiliki simpanan wajib yang bisa dikatakan adalah jantung keuangan dari koperasi ini. Jadi, jika seketika waktu anggota tersebut mengundurkan diri dan mengambil semua simpanan wajibnya maka dapat dipertanyakan tentang bantuan apa yang dapat diberikan kepada anggota setelahnya. Maka, peneliti berkesimpulan bahwa peneliti membutuhkan buku jurnal harian kas masuk ini sebagai penunjang dalam penelitian ini.

Tabel 2. Hasil Usaha Per Anggota Tahun 2023

NO	Nama Anggota	SHU		Jumlah SHU
		Simpanan	Pinjaman	
1	Zaidawati	24.417.707	6150407	30568114
2	Drs. Ahmad yasir	38835138	113530896	52366034
3	Rini Widyastuti	31415704	36902444	68318148
4	Maryati	51042291	553536666	106395057
5	Darnis	12041757	27061792	39103549
6	Siti Chodidjah	86575214	29521955	116097169
7	Wismanelly	23703779	3075204	26778983
8	Winarni	23090110	335057322	58147432
9	Endang	30441267	17836181	48277449
10	Dra. Ardas	29063005	32289639	613552643

NO	Nama Anggota	SHU		Jumlah SHU
		Simpanan	Pinjaman	
11	Siti Masitah	29816971	-	29816971
12	Yarliani	113019931	92225611	122245542
13	Junarso	28967286	20296344	49263630
14	Wayan mada	26923504	25217770	52140174
15	Aiffi Susanto	12622296	20296344	32918640
16	Linda SN	10034773	39362607	49397380
17	Syafwarni	21501654	13530896	35032550
18	Netti Noverita	25331204	22879515	48210719
19	Siti Ngatmini	34846643	46128055	80974699
20	Erlina	22646358	-	22646358
21	Fadilah	19840016	-	19840016
22	Lince Tambunan	9274339	7072968	16347308
23	Rori Eka Prasetya	19949505	861057	20810563
24	Peni Anggareni	19340702	-	19340702
25	Novrianti	14856575	4920326	19776900
26	Puji Lestari	14825653	20357848	35183502
27	Heru Gunawan	14562158	-	14562158
28	Nurlina	14071942	33827240	47899182
29	Eva Rianti	13760864	14760978	28521452
30	Sutrisno	11876512	20296344	32172856
31	Arief Teguh	12460864	11439758	23900622
32	Hadi Wijayanto	12588252	55402869	67991121
33	Alfiandi	10429840	12054798	23518743
34	Yun Ulyati	9987846	13530896	16015586
35	Johannes	16015586	-	1605586
36	Dwi Wulan Sari	6447524	12915855	19363380
37	Rosdiati	4675507	20296344	24971851
38	Tessy	2564821	5535367	8100187
39	Siti Aisyah	2357515	-	2357515
40	Dra. Rismarini	24292813	8610570	32903384

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KPPS SMPN 7 Kota Jambi Tahun 2023

Pada tabel di atas, terdapat data hasil usaha per anggota Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) di SMP Negeri 7 Kota Jambi tahun 2023. Alasan peneliti memasukkan data ini karena dapat dilihat bahwa terdapat simpanan wajib per anggota yang dibayarkan perbulan sebesar Rp. 150.000. sehingga modal simpanan wajib inilah yang akan diolah dalam tabel peminjaman. Sehingga nantinya bunga peminjaman akan dijadikan tabungan bersama kembali sehingga dapat dipakai untuk pemberian THR kepada anggota wajib setiap tahunnya. Banyak hal yang ingin penulis ketahui lebih jauh dari KSPPS di SMP Negeri 7 Kota Jambi ini, seperti bagaimana prinsip ekonomi syariah dalam membantu anggota koperasi dijalankan, bagaimana penerapannya, apa saja kendala-kendalanya, apakah KSPPS di SMP Negeri 7 Kota Jambi sudah melaksanakan prinsip tersebut dengan sepenuhnya atau dapat dikatakan baik atau belum dijalankan, bagaimana solusinya dalam penerapan prinsip ekonomi syariah itu sendiri, dan lain-lain. Sehingga data ini akan peneliti jadikan sebagai bahan acuan dalam melihat apakah koperasi ini telah melaksanakan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) di SMP Negeri 7 Kota Jambi.”

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan deskriptif kualitatif, data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang telah dikumpulkan sangat memungkinkan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. mengatakan bahwa penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan multi-strategi, strategi-strategi yang bersifat interaktif, seperti observasi langsung, observasi partisipasfi, wawancara mendalam, dokumen-dokumen, teknik-teknik pelengkap seperti foto, rekaman, dan lain-lain. Bisa dibilang penelitian ini bersifat fleksibel.

Metode penelitian kualitatif kerap disebut dengan metode penelitian naturalistik, yang mana penelitian ini dilaksanakan dalam keadaan yang alami (Natural setting). Metode Penelitian kualitatif ialah metode yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, dapat difungsikan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Dimana peneliti berperan sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna.

Penelitian ini pada dasarnya mempelajari bagaimana implementasi prinsip ekonomi syariah pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) di SMP Negeri 7 Kota Jambi. Dengan kata lain, mengungkap semua variabel yang menimbulkan terjadinya permasalahan tersebut dari aspek yang mempengaruhi dirinya sendiri. Metode ini pada umumnya bertujuan untuk menampilkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara akurat. Jika disandingkan dengan studi empiris, studi kasus mempunyai perbedaan yang spesifik.

Studi empiris hanya memperhatikan fenomena yang benar-benar terjadi, sedangkan studi kasus condong lebih menginvestigasi fenomena baru yang sedang terjadi namun tidak jelas batasan antara fenomena dan konteksnya. Untuk mengungkap dan menganalisis permasalahan itu, peneliti perlu menngumpulkan data yang berkaitan dengan pengalaman individu tersebut di masa lalu, di masa sekarang, dan di lingkungan tempat permasalahan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Prinsip-prinsip ekonomi syariah pada koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS) di SMP Negeri 7 Kota Jambi

Pada mulanya koperasi yang bernama Koperasi Pegawai Negeri yang disingkat KPN adalah koperasi konvensional yang kemudian berubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pegawai SMP Negeri 7 Kota Jambi yang disingkat KSPPS yang berbasis ekonomi syariah. Menurut Ketua Dewan Pengawas Syariah KSPPS Pegawai SMP Negeri 7 Kota Jambi perubahan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) dengan sistem konvensional menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Pegawai SMP Negeri 7 Kota Jambi yang berbasis ekonomi syariah adalah karena sistem syariah merupakan sebuah mekanisme yang lebih adil, berakad syariah, berorientasi sosial dan komersial serta sesuai dengan nafas kita sebagai lembaga pendidikan keagamaan Islam. (Wawancara dengan Netty Hasanah, M.Pd sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah KSPPS Pegawai SMP Negeri 7 Kota Jambi, 04 Oktober 2024).

Ketua KSPPS menerangkan bahwa perubahan itu juga dilatarbelakangi atas permintaan anggota koperasi. Selain itu di SMP Negeri 7 Kota Jambi banyak terdapat anggota yang telah faham dengan ilmu syariah ditambah saya selaku ketua juga merupakan guru Pendidikan Agama Islam dan juga merupakan seorang Ustadz (Wawancara dengan Ahmad Yasir, S.Ag sebagai Ketua KSPPS Pegawai SMP Negeri 7 Kota Jambi, 23 Oktober

2024).

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021, penerapan prinsip ekonomi syariah terdapat pada pengelolaan kerjasama KSPPS Pegawai SMP Negeri 7 Kota Jambi dengan bank syariah, kerjasama KSPPS Pegawai, dan Unit Pembiayaan Syariah (UPS). dan persewaan kantin. Namun pada pertengahan tahun 2022 kantin tidak lagi disewakan kepada pedagang tetapi berubah menjadi akad syirkah dengan keuntungan perjanjian sesuai bagi hasil. Untuk lebih mengetahui penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah, penulis mewawancarai beberapa orang pengawas dan pengurus KSPPS SMP Negeri 7 Kota Jambi.

a. Prinsip Tauhid (keimanan atau keesaan Allah).

Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa, tiada sesuatupun yang layak disembah selain Allah dan ,tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya, selain daripada Allah' karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena itu, Allah adalah pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanah untuk memiliki untuk sementara waktu, sebagai ujian bagi mereka. Dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepadaNya. Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam dan sumber daya serta manusia (mu'amalah) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepadaNya manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.

Semua yang dilakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan kepada Allah di akhirat kelak. Dalam keterangannya melalui wawancara penulis dengan anggota Dewan Pengawas Syariah KSPPS SMP Negeri 7 Kota Jambi beliau menjelaskan bahwa “Dalam kesehariannya pengurus dan pengawas KSPPS SMP Negeri 7 Kota Jambi, setiap bekerja di koperasi harus ingat dengan Tuhan, inilah nilai tauhid. Bekerja tidak saja dipertanggungjawabkan di hadapan kawan-kawan anggota koperasi tapi juga dipertanggungjawabkan kepada Allah di akhirat nanti” (Wawancara dengan Netty Hasanah, M.Pd sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah KSPPS Pegawai SMP Negeri 7 Kota Jambi 26 Oktober 2020).

Berdasarkan teori diatas dan hasil wawancara penulis bersama informan, jelas bahwa prinsip Tauhid (keimanan atau keesaan Allah) pada prinsip pertama dari prinsip-prinsip koperasi syariah telah diimplementasikan pengurus dalam penerapan berjalannya pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah pegawai (KSPPS) di SMP Negeri 7 Kota Jambi.

b. Prinsip 'Adl (keadilan).

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat-Nya adalah adil. Dia tidak membedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara dzalim. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat daripadanya secara adil dan baik. Dalam banyak ayat, Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Islam mendefinisikan adil sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar dari pada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya. Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia

(mukallaf) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu. Di bidang usaha untuk meningkatkan ekonomi, keadilan merupakan ‚nafas‘ dalam menciptakan pemerataan dan kesejahteraan, karena itu harta jangan hanya saja beredar pada orang kaya, tetapi juga pada mereka yang membutuhkan

Keadilan memiliki arti bahwa Allah telah memerintahkan manusia untuk berbuat adil dan tidak menzalimi pihak lain demi memperoleh keuntungan pribadi. Dalam keterangannya melalui wawancara penulis dengan anggota Dewan Pengawas Syariah KSPPS SMP Negeri 7 Kota Jambi beliau menjelaskan “Bahwa pada KSPPS keadilan tersebut tercermin pada akad-akad syariah. Kalau menerapkan prinsip syariah maka aspek-aspek keadilan itu otomatis sudah masuk di dalamnya”. Contohnya akad murabahah, barang itu seimbang dengan harganya. KSPPS menyeimbangkan harganya dengan tidak terlalu tinggi perbandingan dengan harga pasar.

Berdasarkan teori dan hasil wawancara dengan informan, membuktikan bahwa implementasi prinsip koperasi syariah yang kedua telah dijalankan dengan baik. Hal ini terbukti dengan keuntungan yang diperoleh KSPPS dengan jual beli itu mempertimbangkan harga pasar, jangan menaikkan harga atau menurunkan dari harga pasar. Dengan begitu nilai ‘adil dalam praktek bermuamalah dengan berperilaku secara adil dan tidak merugikan pihak lain (Wawancara dengan Netty Hasanah, M.Pd sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah KSPPS Pegawai SMP Negeri 7 Kota Jambi, 26 Oktober 2024).

c. Prinsip Nubuwwah (kenabian).

Karena sifat rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat bimbingan. Karena itu diutuslah para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali (taubat) keasal-muasal segala sesuatu yaitu Allah. Fungsi Rasul adalah untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan akhirat. Untuk umat Muslim, Allah telah mengirimkan manusia model yang terakhir dan sempurna untuk diteladani sampai akhir zaman, Nabi Muhammad Saw. Sifat-sifat utama sang model yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi serta bisnis pada khususnya adalah Sidiq (benar, jujur), amanah (tanggung jawab, dapat dipercaya, kredibilitas), fathanah (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualitas) dan tabligh (komunikasi keterbukaan dan pemasaran).

Menjadikan sifat dan sikap nabi sebagai teladan dalam melakukan segala aktivitas di dunia. Dalam keterangannya melalui wawancara penulis dengan anggota Dewan Pengawas Syariah KSPPS SMP Negeri 7 Kota Jambi beliau menjelaskan bahwa pada KSPPS dalam mengelola koperasi mengacu dari empat sifat Nabi Muhammad Saw., dalam penerapannya, yaitu Tabligh, Jujur, amanah dan fathanah.

“Jujur dan amanah diterapkan pengurus dan pengawas dalam mengelola koperasi, disampaikan secara jujur atau transparan melalui laporan tahunan anggota kepada seluruh anggota. Bagaimana pengelolaan, berapa modal, berapa keuntungan, berapa bagi hasil per tahun. Jadi, segala amanah yang diberikan oleh anggota kepada pengurus koperasi melalui program kerja dilakukan dengan baik dan secara bertahap. Selanjutnya fathanah, di mana pengurus KSPPS bekerja secara profesional. Begitulah nilai nubuwwah yang penulis ketahui dalam penerapannya pada KSPPS SMP Negeri 7 Kota Jambi” (Wawancara dengan Netty Hasanah, M.Pd) sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah KSPPS Pegawai SMP Negeri 7 Kota Jambi, 26 Oktober 2024).

Berdasarkan teori dan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama informan, membuktikan bahwa implementasi prinsip ekonomi syariah pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah pegawai (KSPPS) di SMP Negeri 7 Kota Jambi telah berjalan

seiring pelaksanaannya.

d. Prinsip Khilafah (pemimpin).

Dalam Al-Qur'an Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Karena itu pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Nabi bersabda: „setiap dari kalian adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya“. Ini berlaku bagi semua manusia, baik dia sebagai individu, kepala keluarga, pemimpin masyarakat atau kepala Negara. Nilai ini mendasari prinsip kehidupan kolektif manusia dalam Islam (siapa memimpin siapa). Fungsi utamanya adalah untuk menjaga keteraturan interaksi antar kelompok termasuk dalam bidang ekonomi agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan, atau dikurangi. Dalam Islam pemerintah memainkan peranan yang kecil tetapi sangat penting dalam perekonomian.

Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syari'ah, dan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Semua ini dalam kerangka mencapai tujuan-tujuan syari'ah untuk memajukan kesejahteraan manusia. Hal ini dicapai dengan melindungi keimanan, jiwa, akal, kehormatan, dan kekayaan manusia. Status khalifah atau pengembalian amanat Allah itu berlaku umum bagi semua manusia, tidak ada hak istimewa bagi individu atau bangsa tertentu sejauh berkaitan dengan tugas kekhilafahan itu.

Namun tidak berarti bahwa umat manusia selalu atau harus memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keuntungan dari alam semesta itu. Mereka memiliki kesamaan hanya dalam hal kesempatan, dan setiap individu bisa mendapatkan keuntungan itu sesuai dengan kemampuannya. Individu-individu diciptakan oleh Allah dengan kemampuan yang berbeda-beda sehingga mereka secara instingtif diperintahkan untuk hidup bersama, bekerja bersama, dan saling memaafkan keterampilan mereka masing-masing.

Namun demikian, ini tidak berarti bahwa Islam memberikan superioritas (kelebihan) kepada majikan terhadap pekerjaannya dalam kaitannya dengan harga dirinya sebagai manusia atau dengan statusnya dalam hukum. Hanya saja pada saat tertentu seseorang menjadi majikan dan pada saat lain menjadi pekerja. Pada saat lain situasinya bisa berbalik, mantan majikan bisa menjadi pekerja dan sebagainya dan hal serupa juga bisa diterapkan terhadap budak dan majikan.

Peran pemimpin bertujuan untuk memastikan tidak ada distorsi sehingga perekonomian dapat berjalan dengan baik. Dalam keterangannya melalui wawancara penulis dengan Ketua KSPPS SMP Negeri 7 Kota Jambi beliau menjelaskan “Bahwa usaha yang dilakukan KSPPS mempunyai manfaat dan tidak menimbulkan mudharat, yaitu membantu anggota mendapatkan keuntungan membantu anggota yang kekurangan dana, tidak hanya komersil, tetapi KSPPS juga ada nilai sosialnya, misalnya dengan mengalokasikan sebagian dana SHU untuk pemberian dana sosial kepada para pensiunan pegawai mantan anggota KPN atau KSPPS SMP Negeri 7 Kota Jambi. anggota yang keluarganya ada meninggal dunia, pegawai-pegawai yang pendapatannya masih kecil (honorar)”. (Wawancara dengan Ahmad Yasir, S.Ag) sebagai Ketua KSPPS Pegawai SMP Negeri 7 Kota Jambi, 23 Oktober 2024).

Berdasarkan teori dan penjelasan wawancara kepada informan diatas perlu ketahui bahwa pengelola KSPPS adalah orang-orang yang ditunjuk sebagai pemimpin (khilafah) yang bertugas untuk mensejahterakan anggotanya (KSPPS). Selain itu, nilai khilafah memiliki arti bahwa pemimpin bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan pokok dan terciptanya keseimbangan dan kesejahteraan sosial. Artinya, implementasi penerapan prinsip koperasi syariah keempat telah terlaksana dengan seiring pelaksanaannya.

e. Ma'ad (hasil).

Walaupun seringkali diterjemahkan sebagai kebangkitan tetapi secara harfiah ma'ad berarti kembali. Dan kita semua akan kembali kepada Allah. Hidup manusia bukan hanya di dunia, tetapi terus berlanjut hingga alam akhirat. Pandangan yang khas dari seorang Muslim tentang dunia dan akhirat dapat dirumuskan sebagai: Dunia adalah ladang akhirat'. Artinya dunia adalah wahana bagi manusia untuk bekerja dan beraktivitas (beramal shaleh), namun demikian akhirat lebih baik daripada dunia. Karena itu Allah melarang manusia hanya untuk terikat pada dunia, sebab jika dibandingkan dengan kesenangan akhirat, kesenangan dunia tidaklah seberapa. Setiap individu memiliki kesamaan dalam hal harga diri sebagai manusia. 9 Perbedaan tidak bisa diterapkan berdasarkan warna kulit, ras, kebangsaan, agama, jenis kelamin atau umur. Hak-hak dan kewajiban- kewajiban ekonomi, 10 setiap individu disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya dan dengan peranan-peranan normatif masing-masing dalam struktur sosial.

Dalam keterangannya melalui wawancara penulis dengan Ketua KSPPS SMP Negeri 7 Kota Jambi beliau menjelaskan "Bahwa secara duniawi, berdasarkan data pada pemaparan data diketahui bahwa Sisa Hasil Usaha (SHU) meningkat dari tahun 2019 sampai tahun 2024. Untuk tahun 2020 (akibat pandemi covid-19) banyak usaha yang tidak jalan, sehingga hasilnya belum diketahui. Secara ukhrawi usaha yang dilakukan itu nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Maka dengan melaksanakan perekonomian syariah, beliau berharap insya Allah akan ada nilai pahalanya di sisi Allah". (Wawancara dengan Ahmad Yasir, S.Ag sebagai Ketua KSPPS Pegawai SMP Negeri 7 Kota Jambi, 23 Oktober 2020).

Berdasarkan tori dan penjelasan dari hasil wawancara bersama informan, jelas membuktikan bahwa pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah pegawai (KSPPS) di SMP Negeri 7 Kota Jambi telah mengimplementasikan prinsip koperasi syariah yang kelima.

2. Kendala dalam penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah pada koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS) di SMP Negeri 7 Kota Jambi

Setiap usaha pasti mengalami perubahan dan setiap perubahan sering mengalami kendala. Begitu juga koperasi yang sebelumnya merupakan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) SMP Negeri 7 Kota Jambi yang menggunakan sistem ekonomi konvensional menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Pegawai SMP Negeri 7 Kota Jambi yang menggunakan sistem ekonomi syariah, kendala tersebut bisa dari anggota, pengelola maupun produk koperasi itu sendiri. Dalam wawancara dengan pengawas dan pengurus KSPPS beberapa kendala pada pengelolaan terutama dalam penerapan prinsip KSPPS, yaitu kendala pada anggota, kendala pada pengurus dan kendala pada produk KSPPS.

a. Prinsip Tauhid (keimanan atau keesaan Allah).

Menurut Ketua Dewan Pengawas Syariah, ada saja anggota koperasi yang menganggap bahwa prinsip ekonomi syariah itu agak sulit untuk diterapkan karena yang dicari anggota itu sebenarnya adalah uang untuk dipinjam (Wawancara dengan Ahmad Yasir, S.Pd sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah KSPPS Pegawai SMP Negeri 7 Kota Jambi, 5 Oktober 2024). Pernyataan itu ada benarnya, karena memang ada pandangan sinis yang menyatakan walaupun sistemnya ekonomi syariah namun ternyata sama saja dengan sistem ekonomi konvensional, hanya namanya saja yang berbeda padahal sistemnya tidak berbeda. Sinisme tersebut dilihat dari kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah sangat rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari partisipasi umat Islam dalam investasi atau perguliran modal (Mu'allim, 2003, hal. 19-20). Kendala dalam penerapan Prinsip Tauhid (keimanan atau keesaan Allah) adalah:

- Paradigma berpikir anggota masih berorientasi cara-cara konvensional.

- Anggota belum dapat memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai syariah. Sebagai contoh, ketika anggota koperasi mengajukan pembiayaan pembelian barang, anggota tidak menyerahkan kuitansi pembelian barang.
- Gedung/ruang sekretariat yang belum representatif.
- Jumlah karyawan masih terbatas.

b. Prinsip Nubuwwah (kenabian).

Sesuai pada isi Laporan Pertanggungjawaban KSPPS Pegawai SMP Negeri 7 Kota Jambi Pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2019 di atas dikatakan bahwa kendala awal yang dirasakan oleh pengurus dan pengawas KSPPS dalam pengimplementasian prinsip Nubuwwah (kenabian) adalah paradigma berpikir anggota yang masih berorientasi dengan cara-cara konvensional dan anggota belum dapat memenuhi persyaratan-persyaratan dalam bermuamalah sesuai syariah terutama dalam penerapan sesuai dengan cara-cara nabi (kenabian).

Namun sebenarnya, untuk menerapkan prinsip ekonomi syariah khusus prinsip Nubuwwah (kenabian) tidaklah sulit, bahkan mudah, asalkan seluruh anggota koperasi memahami apa sebenarnya nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip ekonomi syariah tersebut. Maka perlu sosialisasi kepada anggota agar mereka memiliki pengetahuan, mempunyai sikap dan menjalankan kewajiban serta menerima hak sesuai aturan.

Pada produk harus dilengkapi dengan persyaratan yang harus dipenuhi. Sebagai umat Muslim, Allah telah mengirimkan manusia model yang terakhir dan sempurna untuk diteladani sampai akhir zaman, Nabi Muhammad Saw. Sifat-sifat utama sang model yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi serta bisnis pada khususnya adalah Sidiq (benar, jujur), amanah (tanggung jawab, dapat dipercaya, kredibilitas), fathonah (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualitas) dan tabligh (komunikasi keterbukaan dan pemasaran).

Menjadikan sifat dan sikap nabi sebagai teladan dalam melakukan segala aktivitas di dunia. Dalam keterangannya melalui wawancara penulis dengan anggota Dewan Pengawas Syariah KSPPS SMP Negeri 7 Kota Jambi beliau menjelaskan bahwa kendala yang dihadapi dalam pengimplementasian ini adalah tabligh yang mana contoh kecil kendala yang dialami tentang prinsip ini adalah bukti transaksi anggota dengan KSPPS. Dengan demikian, pada Rapat Anggota Tahunan (RAT), biasanya disosialisasikan kepada anggota bahwa sistem syariah basisnya lebih ke asas underline asset (ada barang, ada jasa), komoditasnya bukan uang, itu pada sisi anggota. Pada pengelola didiskusikan untuk membuat SOP.

c. Prinsip Khilafah (pemimpin).

Kendala yang sering terjadi pada pengelola koperasi adalah kurangnya sikap profesionalitas para pengelola koperasi, hal ini terjadi karena tingkat pendidikan pengelola serta keahlian yang dimiliki pengelola terbatas. Kurang profesionalnya pengelola koperasi antara lain karena rangkap jabatan yang menyebabkan kurangnya perhatian pada pengelolaan koperasi. Pengelola KSPPS sendiri pada umumnya adalah guru dan karyawan SMP Negeri 7 Kota Jambi yang diamanahi tugas tambahan. Pengelola koperasi sering mengalami kesulitan pada sistem administrasi.

Contohnya mengenai bukti-bukti transaksi dengan anggota. Mungkin karena pengelola merasa kekeluargaan, jadi agak susah menagih bukti-bukti transaksi dari anggota. Padahal bukti transaksi itu penting sebagai bukti terjadinya transaksi. Dan dalam rangka menjudge bahwa ini sesuai dengan prinsip syariah (Wawancara dengan Wayan Mada, M.Pd sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah KSPPS Pegawai SMP Negeri 7 Kota Jambi, 26 Oktober 2024).

3. Solusi untuk mengatasi kendala dalam penerapan implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah pada koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS) di SMP Negeri 7

Kota Jambi

Strategi/Solusi merupakan langkah yang diambil oleh pemimpin untuk mengatasi suatu masalah yang terjadi dalam suatu organisasi. Strategi dalam penelitian ini merujuk pada, bagaimana Solusi untuk mengatasi kendala dalam penerapan implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah pada koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS) di SMP Negeri 7 Kota Jambi sehingga mampu menjadi koperasi yang unggul dan berhasil.

Keberhasilan yang dicapai koperasi ini berkat kemampuan koperasi dalam menyusun strategi yang digunakan dalam mengatasi suatu masalah-masalah yang sedang di hadapi. Ada beberapa strategi yang di paparkan dalam menentukan faktor-faktor keberhasilan dalam menerapkan prinsip koperasi syariah yaitu Mendorong terlibat aktif dalam Proses pelaksanaan program yang membuat anggota semakin antusias pada penerapan prinsip koperasi syariah.

Selalu menampilkan pengelolaan dana yang transparan dan amanah, agar para anggota yakin bahwa implementasi prinsip koperasi syariah pada koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS) di SMP Negeri 7 Kota Jambi harus dilaksanakan dan mendapat dukungan penuh. Selanjutnya solusi yang ditawarkan dalam implementasi prinsip-prinsip koperasi syariah agar berjalan sesuai harapan adalah dengan cara menjaga prinsip keadilan dalam penerapannya, sehingga mampu memberikan manfaat secara merata pada semua anggota tanpa diskriminasi.

a. Prinsip Tauhid (keimanan atau keesaan Allah).

KSPPS lebih memilih pendekatan persiasif dan kekeluargaan sesuai dengan prinsip umum koperasi itu sendiri, agar hasil muamalah dalam transaksi KSPPS sesuai syariat. Hasilnya disampaikan kepada anggota koperasi dalam Pertanggungjawaban Laporan Tahunan pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) setiap tahun. (Wawancara dengan Rosdiati, M.Pd, sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah KSPPS SMP Negeri 7 Kota Jambi, 26 Oktober 2024). Setiap unit usaha KSPPS ada penanggungjawabnya masing-masing, hal ini pun juga tertera pada prinsip-prinsip koperasi syariah sehingga para anggota yakin dan mendukung penuh pengimplementasiannya tentunya atas dasar keimanan dan keesaan Allah.

b. Prinsip Nubuwwah (kenabian).

Dalam hal ini pihak koperasi menawarkan solusi agar bertindak lebih tegas apabila bekerjasama dalam melakukan kegiatan bermuamalah seperti kerjasama dalam hal sewa tentunya dalam prinsip nubuwah (kenabian), apabila ada yang melakukan pelanggaran ringan seperti lambat membayar sewa bisa diberikan teguran, namun untuk pelanggaran berat seperti menyewakan kembali ke orang lain tanpa diketahui oleh pihak koperasi, berhenti tanpa pemberitahuan, dan tidak membayar. Maka untuk pelanggaran berat seperti di atas, untuk koperasi berhak melakukan tindakan sesuai aturan yang berlaku. Untuk mengatasi keadaan terhadap pelanggaran sewa kantin, dibuat kebijakan baru, yaitu tidak lagi berbasis sewa tetapi berbasis bagi hasil. Pedagang 80% dan koperasi 20%.

Dalam hal ini pihak pengurus koperasi dapat menjelaskan kepada pedagang yang menyewa kantin agar penyewa kantin mengetahui bagi hasil 20% yang diterima oleh KSPPS digunakan untuk keperluan apa saja, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat mengakibatkan reputasi koperasi buruk di mata orang lain yang tidak mengetahui bagaimana kinerja pengurus dan pengawas koperasi dalam menerapkan prinsip ekonomi islam sesungguhnya (Wawancara dengan Rosdiati, M.Pd sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah KSPPS Pegawai SMP Negeri 7 Kota Jambi, 26 Oktober 2024).

c. Prinsip Khilafah (pemimpin).

Dalam hal ini perlu pelatihan manajemen untuk pengurus koperasi sebagai khilafah (Pemimpin), pengurus perlu memperlakukan sama untuk setiap anggota, apabila ada

anggota yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya maka harus diberikan teguran. Selain itu, setiap bukti transaksi pada kegiatan bermuamalah harus diarsipkan pengurus koperasi secara baik agar mempermudah pengurus ketika dewan pengawas syariah meminta bukti transaksi pada kegiatan bermuamalah di koperasi.

Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syari'ah, dan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Semua ini dalam kerangka mencapai tujuan-tujuan syari'ah untuk memajukan kesejahteraan manusia. Hal ini dicapai dengan melindungi keimanan, jiwa, akal, kehormatan, dan kekayaan manusia. Status khalifah atau pengembal amanat Allah itu berlaku umum bagi semua manusia, tidak ada hak istimewa bagi individu atau bangsa tertentu sejauh berkaitan dengan tugas kekhalifahan itu. Individu-individu diciptakan oleh Allah dengan kemampuan yang berbeda-beda sehingga mereka secara instinktif diperintahkan untuk hidup bersama, bekerja bersama, dan saling memaafkan keterampilan mereka masing-masing.

KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah, maka Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) di SMP Negeri 7 Kota Jambi dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) di SMP Negeri 7 Kota Jambi, yaitu:
  - a. Pada KSPPS Pegawai di SMP Negeri 7 Kota Jambi penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dilakukan dengan cara menerapkan lima nilai universal pada prinsip-prinsip ekonomi syariah yang terdiri dari:
    - 1) Tauhid, pengelolaan tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada anggota koperasi, tetapi juga kepada Allah.
    - 2) "Adl, keadilan dalam pengelolaan diterapkan pada akad-akad transaksi bermuamalah.
    - 3) Nubuwwah, pengelolaan mengacu kepada sifat-sifat kenabian, yaitu siddiq, 'amanah, tabligh dan fathanah.
    - 4) Khilafah, kepemimpinan dalam pengelolaan merupakan pengejawantahan dari peran dan fungsi manusia sebagai khalifah/wakil tuhan di muka bumi yang bertugas mensejahterakan anggotanya.
    - 5) Ma'ad, imbalan atau laba, yaitu laba di dunia dan laba di akhirat.
2. Kendala dalam penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah pada koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS) di SMP Negeri 7 Kota Jambi:
  - a. Kendala pada penerapan prinsip Tauhid, yaitu paradigma berpikir anggota yang masih berorientasi cara-cara konvensional dan ketidakpahaman mereka terhadap ekonomi syariah
  - b. Kendala pada prinsip Nubuwwah pengelola, yaitu terbatasnya jumlah karyawan dan pengelola mengalami kesulitan pada sistem administrasi, penyelesaian masalah berdasarkan sifat-sifat kenabian.
  - c. Kendala pada prinsip Khilafah, yaitu terbatasnya pengetahuan sebagai pemimpin koperasi, karna di KPPS ini pemimpinnya adalah sesama guru dan staff yang ada di SMP Negeri 7 Kota Jambi saja.
3. Solusi untuk mengatasi kendala dalam penerapan implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah pada koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS) di SMP Negeri 7 Kota Jambi
  - a. KSPPS lebih memilih pendekatan persiasif dan kekeluargaan sesuai dengan prinsip umum koperasi itu sendiri, agar hasil muamalah dalam transaksi KSPPS sesuai syariat

- b. Selalu menampilkan pengelolaan dana yang transparan dan amanah, agar para anggota yakin bahwa implementasi prinsip koperasi syariah pada koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS) di SMP Negeri 7 Kota Jambi harus dilaksanakan dan mendapat dukungan penuh
- c. Dalam pengambilan keputusan di KSPPS menggunakan musyawarah Menjaga prinsip keadilan dalam penerapannya, sehingga mampu memberikan manfaat secara merata pada semua anggota tanpa diskriminasi terutama dalam menjalankan kepemimpinan dalam koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga & Widiyanti. *Dinamika Koperasi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2017.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Pengantar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Antonio, M. Syafii. *Bank Syariah: Teori dan Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. Depatemen Pendidikan Nasional, 2020.
- Arman Maulana. S. M. *Manajemen Koperasi*. Jawa Barat: Guepedia, 2020.
- Asutji, Muhammad. *Manajemen dan Etika Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013
- Fifi Hasmawati. M. *Manajemen Koperasi*. Medan: Duta Azhar, 2024.
- Halid. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UGM, 2018.
- Hasan. M. A. *Masail Fiqiyah (Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022.
- Hendrojogi. (*Koperasi: Azas-Azas, Teori dan Praktik*). Jakarta: PT Rajawali Press, 2022.
- Hermuningsih. *Pengaruh Profitabilitas, Growth Opportunity, Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Publik di Indonesia*. Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Isbandi. A. *Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2021.
- Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: rajawali Press, 2022.
- Marpaung. *Pengaruh kepemimpinan dan Team work Terhadap kinerja karyawan Di koperasi sekjen kemdikbud senayan Jakarta*. Jakarta: Jurnal Ilmiah, 2022.
- Moleong. Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2021.
- Sudarsono. *Manajemen Koperasi Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2019.
- Sudjana. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2021.
- Sudjana dan Ibrahim. *Koperasi Teori dan Praktik*. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Sugiharto. R. Toto. *Ensiklopedi Koperasi*. Bandung: CV. Smart Media Publishing, 2016.
- Sugini. *Koperasi Indonesia dalam era MEA dan Ekonomi Digital*. Malang: UB Press, 2020.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2016.